

Tingkat Pemahaman Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terhadap Konsep Moderasi Beragama

Sasmi Selvia¹, Munawar Rahmat², Saepul Anwar³

¹ Universitas Pendidikan Bandung, Indonesia; sasmiselvia@upi.edu

² Universitas Pendidikan Bandung, Indonesia; munawarraahmat.pai@upi.edu

³ Universitas Pendidikan Bandung, Indonesia; saefull@upi.edu

ARTICLE INFO

Keywords:

Religious moderation;
Student;
College.

ABSTRACT

This study aims to compare the level of understanding of student religious moderation in public and religious universities. This study uses a quantitative approach with a comparative design. By using a random sampling technique, a sample of 160 people was selected, with details of 80 samples from Public Higher Education (PTU) students, and 80 students from State Islamic Religious Colleges (PTKIN). The results showed that the average score of PAI students' understanding level at PTU was 131.76 or was in the medium category. Meanwhile, the average score of PAI students' understanding level at PTKIN was 128.01 which was also in the medium category. Then the results were analyzed using the Mann Whitney U test. Based on the results of these tests, the asymp results were obtained. Sig. (2-tailed) of 0.006 which is smaller than 0.025. So, it can be concluded that there is a significant average difference between the level of understanding of PAI students at PTU and PTKIN on the concept of religious moderation. Where, the average understanding of PAI students at PTU is 3.69 points greater than the understanding of PAI students at PTKIN. However, PAI students' understanding of religious moderation at both PTU and PTKIN is in the moderate category. This means that their understanding of religious moderation is quite moderate.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Munawar Rahmat

Universitas Pendidikan Bandung, Indonesia; munawarraahmat.pai@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Muslim Indonesia secara historis adalah muslim yang moderat (Amar, 2018). Kemoderatan yang ditampilkan oleh muslim Indonesia tersebut merupakan kekuatan terbesar bangsa kita, yang sejak dulu telah menjadi garda depan penyejuk dan penebar kedamaian. Sikap moderat tersebut telah ditunjukkan oleh *founding father* bangsa Indonesia saat mencanangkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” untuk mempersatukan bangsa (Amar, 2018). Dengan sikap moderat tersebut, para pendahulu kita dapat dengan mudah mempersatukan Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya dan agama.

Nilai-nilai Islam moderat yang sedemikian ideal tersebut seharusnya nampak pada setiap dimensi kehidupan para penganutnya, untuk melahirkan iklim toleransi sebagai upaya menangkal radikalisme (Dianita & dkk, 2018). Umat Islam harus tampil menjadi yang terdepan dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, juga mengedepankan akhlak mulia pada sesama manusia, maupun alam semesta, termasuk menjunjung tinggi prinsip saling menghargai perbedaan, kerukunan, perdamaian, kesantunan, kepedulian terhadap lingkungan dan manifestasi akhlak mulia yang lainnya (Masduqi, 2013).

Sayangnya, akhir-akhir ini, kemoderatan ajaran Islam tersebut telah tereduksi oleh oknum-oknum yang menampakkannya sebagai Islam yang radikal, intoleran, merasa paling benar, mudah mengkafirkan orang lain, dan jauh dari nilai-nilai kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (Fuad, 2020). Nilai-nilai tersebut direduksi oleh kelompok dogmatik yang berpaham radikal untuk menjustifikasi aksi-aksi kekerasan atas nama agama (Masduqi, 2013).

Berdasarkan riset Maarif Institute pada tahun 2011, Setara Institute pada tahun 2015, dan Wahid Foundation pada tahun 2016, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok radikal telah secara masif melakukan penetrasi pandangan radikal di kalangan generasi muda melalui institusi pendidikan (Sutrisno, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, ada banyak catatan kejadian perilaku yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Misalnya saja pada tanggal 15 Mei 2018, di Universitas Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut UPI) dihebohkan dengan adanya salah satu mahasiswi yang ditangkap oleh polisi di sekitar Mako Brimob Kepala Dua, Kota Depok. Mahasiswi tersebut diyakini sebagai pion untuk menyebarkan radikalisme di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (Nugraha, 2018). Kejadian tersebut menjadi salah satu contoh dari sekian aksi serupa yang terjadi di perguruan tinggi hingga saat ini.

Dengan Masih banyaknya aksi terorisme dan tindakan yang mengarah kepada radikalisme di Indonesia saat ini, khususnya di dunia pendidikan, merupakan bukti konkrit betapa pemahaman dan penghayatan nilai-nilai moderasi masih rendah (Munir & Herianto, 2020). Oleh karena itu, berbagai pendekatan penanganan terorisme dan radikalisme harus senantiasa diupayakan. Sebab, untuk mencapai kepribadian moderat (dalam paradigma dan sikap), ia butuh upaya khusus yang disebut sebagai "ilmu dan pemahaman" tentang moderat itu sendiri (Mubakkirah, 2018). Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan program deradikalisasi melalui pemahaman konsep moderasi beragama (Kusuma, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta tahun 2021 tentang potret moderasi beragama di kalangan mahasiswa muslim, menjelaskan bahwa dari ketiga PTKIN, ada beberapa faktor yang rentan, salah satunya adalah empati terhadap aliran lain di dalam Islam rendah, dan penolakan tinggi. Padahal idealnya empati umum tinggi, dan penolakan rendah. Jika penelitian terdahulu hanya berfokus pada mahasiswa di kampus Islam (PTKIN) saja, maka cakupan pada penelitian ini akan membahas lebih jauh tentang pemahaman moderasi beragama pada mahasiswa PTU dan PTKIN, namun difokuskan hanya pada mahasiswa PAI saja, sebab, mahasiswa PAI yang nantinya menjadi guru PAI akan membentuk cara pandang agama siswa di luar orang tua. Keberhasilan guru PAI dalam membentuk paham keagamaan moderat sejak dini, akan menekan angka radikalisme siswanya di kemudian hari. Peran guru PAI seharusnya tidak hanya menyalurkan ilmu pengetahuan tapi juga harus dapat mendidik akhlak peserta didik, sehingga selain mencerdaskan, tapi juga dapat memunculkan orang-orang yang berbudi luhur (Jentoro & dkk, 2020). Guru PAI harus memberikan pemahaman bahwa agama membawa risalah cinta, bukan menebar kebencian, dan sistem di sekolah leluasa pada segala perbedaan (Sutrisno, 2019). Guru PAI tidak boleh memiliki sikap eksklusif, karena merekalah yang akan mengajarkan agama dalam jumlah komunikasi yang banyak. Sedikit saja mereka salah mengajarkan paham keagamaan, maka akan berdampak pada paham keagamaan siswanya. Oleh karenanya, mencetak pendidik yang toleran dan multikultural merupakan satu paket yang tidak dapat terpisahkan sebagai upaya mereduksi intoleransi dan radikalisme di Tanah Air (Hanafi & dkk, 2022).

Di Indonesia sendiri, guru PAI dihasilkan oleh dua Kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama. Salah satu perguruan tinggi yang

menyelenggarakan program studi PAI di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah UPI. Sedangkan, salah satu perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan program studi PAI adalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengingat ada dua Kementerian yang menghasilkan calon guru PAI, serta masih sedikitnya penelitian yang mengukur tentang pemahaman moderasi beragama di kalangan mahasiswa PAI, maka, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang 1) tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama, dan 2) perbandingan tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama.

2. METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif yang mencoba membandingkan tingkat pemahaman moderasi beragama mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN. Adapun partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 7 angkatan 2018 prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI, dan jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Djati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui sebaran angket mengenai moderasi beragama, kemudian hasilnya dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, dan statistik inferensial untuk membuat kesimpulan tentang keadaan populasi berdasarkan riset terhadap sampel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tingkat Pemahaman Mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap Konsep Moderasi Beragama

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yakni mengenai tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama, maka, analisis yang pertama dilakukan adalah analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama.

Berdasarkan hasil kategorisasi, secara umum, tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama berada pada kategori sedang, dimana rata-rata pemahaman moderasi beragama mahasiswa PAI di PTU sebesar 131,76 dan rata-rata pemahaman moderasi beragama mahasiswa PAI di PTKIN adalah 128,01. Untuk lebih jelasnya, persentase tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN

No	Kriteria	Persentase	
		PTU	PTKIN
1	Rendah	0%	1,25%
2	Sedang	66,25%	77,5%
3	Tinggi	33,75%	21,25%

Dari tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN berada pada tingkat moderasi beragama yang sedang. Hal tersebut ditunjukkan dengan presentase mahasiswa PAI di PTU lebih dari setengahnya atau sebesar 66,25% berada pada kategori sedang, dan 77,5% mahasiswa PTKIN juga memiliki pemahaman moderasi beragama yang sedang.

Dari pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama sudah cukup baik atau moderat, hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian angket yang sebagian besar berada pada kategori sedang, artinya mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN ini memiliki paham yang moderat, tidak terlalu ekstrem ke kiri dan tidak juga

terlalu ekstrem ke kanan. Sikap yang moderat seperti ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sebab mahasiswa PAI memiliki peran sebagai katalisator keberagaman moderat pada masyarakat

Apalagi saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan ekstremisme dan intoleransi. Hasil penelitian Pusat Studi Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 pada 18 kota/kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa ancaman ekstremisme di kalangan kaum muda berusia 15-24 sangat mengkhawatirkan (Saputra, 2018). Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga di 18 kota/kabupaten di Indonesia, berkenaan literatur keislaman generasi milenial. Hasilnya, generasi milenial sangat memiliki minat untuk mengakses literatur keagamaan. Namun, masalahnya terletak pada pilihan topik yang mereka akses, di mana jihad dan khilafah paling banyak diminati (Hasan & dkk, 2018). Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, dimana dapat kita ketahui bahwa hampir 60% mahasiswa PAI di PTKIN setuju jika Indonesia akan sejahtera kalau mengadopsi sistem khilafah dalam pemerintahannya.

Hal ini perlu menjadi perhatian besar bagi berbagai pihak untuk menanamkan kembali pemahaman mengenai sistem pemerintahan Indonesia kepada mahasiswa PAI, baik di PTU maupun di PTKIN, sebab kelak mereka akan menjadi guru PAI yang akan mengajarkan agama Islam dalam jumlah yang banyak. Sedikit saja kesalahan pemahaman yang mereka sampaikan, akan berdampak pada pemahaman keagamaan siswanya di kemudian hari. Maka, disini peran mahasiswa PAI yang mana akan menjadi calon guru PAI kelak sangat berpengaruh. Peran besar dari pendidik dalam pendekatan moderasi bagi peserta didik harus terlebih dahulu mewujudkan pendidik yang moderat dan menjadi teladan atau *uswatun hasanah* (Sumarto & Harahap, 2021). Guru PAI harus memiliki pemahaman moderasi yang baik, sehingga kelak ia bisa menyampaikan materi pendidikan agama islam pada siswanya secara moderat juga (Suwarni & Atasoge, 2021). Meski demikian, kekhawatiran yang dipaparkan oleh beberapa penelitian tersebut sedikit terobati oleh hasil skor penelitian pada item keenam dalam sebaran angket pada penelitian ini, di mana dapat kita ketahui bahwa sebagian besar mahasiswa PAI di PTU atau hampir mencapai 70% nya tidak setuju jika Indonesia akan sejahtera ketika mengadopsi syistem khilafah dalam pemerintahannya. Pemahaman yang dimiliki oleh sebagian besar mahasiswa PAI di PTU tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan agar kelak mereka menjadi guru PAI yang moderat.

Adapun, pembahasan mengenai angket yang digunakan untuk mengukur pemahaman moderasi beragama tersebut terbagi menjadi tiga dimensi, yakni sebagai berikut:

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang terhadap ideologi kebangsaan, terutama menerima pancasila sebagai dasar negara (Suwarni & Atasoge, 2021). Berdasarkan temuan pada penelitian ini, mengenai dimensi komitmen kebangsaan, rata-rata mahasiswa PAI di PTU atau sebesar 74% responden memiliki komitmen terhadap bangsa yang cukup baik atau moderat, bahkan berdasarkan pengkategorian terhadap dimensi ini, lebih dari 20% nya berada pada level tinggi, artinya mereka sudah menerima bahwa pancasila adalah dasar bagi penciptaan relasi-relasi harmonis antaragama dan antarbudaya di Indonesia, Pancasila adalah cerminan asli Indonesia (Malik, 2020). Pancasila adalah konsensus atau kesepakatan bersama para pendiri Bangsa yang sudah final, yang sudah selesai tidak bisa di ubah lagi, menjadi Ideologi Bangsa dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara (Sumarto & Harahap, 2021). Komitmen mahasiswa PAI di PTU terhadap Pancasila tersebut terbukti dari hasil angket pada item kelima yang mana hampir 90% responden menyatakan pendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan, dari temuan dalam penelitian ini dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden atau lebih dari 90%nya telah menunjukkan sikap menghargai segala jenis perbedaan, baik perbedaan suku, budaya, bahkan perbedaan agama sekalipun.

Sejalan dengan komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh mahasiswa PAI di PTU, mahasiswa PAI di PTKIN pun memiliki komitmen kebangsaan yang cukup baik, dengan rata-rata yang tidak jauh berbeda yakni sebesar 74%, dimana sekitar 90% nya berada pada kategori sedang, dan sisanya memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Namun, persentase mahasiswa PAI di PTKIN yang memiliki

komitmen terhadap Pancasila lebih rendah daripada mahasiswa PAI di PTU, yang mana mahasiswa PAI di PTKIN hampir 30%nya menyatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan lebih dari setengahnya atau sebesar 57,5% menyatakan bahwa Indonesia akan sejahtera jika mengadopsi sistem khilafah dalam pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran intoleran telah merasuki mahasiswa jurusan PAI. Karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, organisasi Islam moderat, ataupun para dosen untuk meningkatkan pemahaman mahasiswanya tentang komitmen kebangsaan. Sebab demokrasi bukan hanya tidak bertentangan dengan ajaran agama, tetapi mewujudkan ajaran agama itu wajib dalam kehidupan bernegara (Paralihan, 2019). Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan untuk bermusyawarah. Di antaranya Q.S. Asyūrā/42: 38.

Komitmen kebangsaan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh mahasiswa PAI, sebab Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Bagi Indonesia, keragaman adalah anugerah sekaligus kekuatan sebagai sebuah bangsa (Anwar S. , 2016, hal. 438). Identitas kebangsaan ini sering berhadapan dengan banyaknya aksi radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan fundamentalisme yang mengganggu peradaban Indonesia serta berdampak pada komitmen kebangsaan Indonesia (Nor S, 2020).

b. Toleransi

Dimensi kedua pada angket moderasi beragama yakni mengenai toleransi. Toleransi adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, dimana seseorang dapat menghargai, serta menghormati perilaku orang lain (Bakar, 2015). Pada dimensi ini, rata-rata mahasiswa PAI di PTU atau sekitar 76% sudah menunjukkan sikap toleransi. Bahkan lebih dari 90%nya bersedia bersahabat dengan orang yang berbeda agama. Meski begitu, hal yang sangat disayangkan adalah sebesar 50% responden tidak mengizinkan penganut agama lain memperingati hari besar keagamaannya di lingkungan sekitar, juga enggan menciptakan suasana tenang saat ada perayaan hari besar agama lain di lingkungannya. Padahal Islam telah mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajarannya (Nurdin, 2018). Semua agama adalah benar bagi para pemeluknya masing-masing. Makna dari prinsip ini adalah orang nonmuslim memiliki hak dan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya di tempat-tempat mereka, sementara orang Islam tidak boleh mengganggu mereka. Sebaliknya, orang Islam memiliki hak dan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya di tempat-tempat mereka, sementara nonmuslim tidak dibenarkan mengganggunya. Sikap seperti ini sangat penting ditanamkan bagi warga Indonesia, sebab kerukunan hanya dapat tercipta diantara masyarakat yang heterogen seperti Indonesia ketika keragaman dihargai, bukan diancam (Anwar S. , 2018). Dalam Al-Qur'an, landasan mengenai toleransi ini terdapat dalam surat Al-Kāfirūn.

Sejalan dengan tingkat toleransi mahasiswa PAI di PTU, rata-rata mahasiswa PTKIN atau sebesar 72% telah menunjukkan sikap toleransi, terutama menghargai perbedaan mazhab yang mana mayoritas responden atau lebih dari 90% tidak keberatan dengan adanya mazhab islam yang berbeda di lingkungan sekitarnya. Sayangnya toleransi tersebut tidak begitu berlaku pada orang yang berbeda agama. Mayoritas mahasiswa PAI di PTKIN atau hampir 80% nya tidak mengizinkan pengikut agama lain melakukan perayaan hari besar keagamaan di lingkungannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta melalui program CONVEY Indonesia terkait potret Moderasi Beragama di kalangan mahasiswa Muslim di tiga PTKIN: UIN Jakarta, UIN Bandung dan UIN Yogyakarta pada tahun 2021. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa empati seseorang terhadap penganut agama lain relatif rendah dan penolakan terhadap penganut aliran lain di dalam Islam seperti relatif tinggi.

c. Anti Kekerasan

Dimensi terakhir dari moderasi beragama ini adalah anti-kekerasan. Menurut Narayan Desai, anti-kekerasan adalah harmoni dalam kehidupan. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu yang mengganggu kerukunan hidup adalah kekerasan. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat kita ketahui bahwa hampir seluruh mahasiswa PAI di PTU atau sebesar 98% telah menunjukkan sikap anti terhadap kekerasan. Begitupula dengan mahasiswa PAI di PTKIN, rata-rata mahasiswa PAI di PTKIN atau sebesar 86% juga telah menunjukkan sikap anti terhadap kekerasan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada satupun mahasiswa PAI di PTU yang mengikuti ustaz/pemuka agama yang suka

merendahkan agama yang berbeda. Padahal, berdasarkan penelitian yang dilakukan Achmad Fairozi dan Sulistiya Ayu A pada tahun 2020, menyebutkan bahwa dakwah di media sosial pada masa pandemi ini telah didominasi oleh “Islam Marah” dengan karakteristik keras, ekstrim, anti perbedaan, menyalahkan, fanatic dan eksklusif (Fairozi & A, 2020). Hal tersebut membuktikan bahwa mahasiswa PAI di PTU telah memiliki kesadaran terhadap wajah islam sesungguhnya, sehingga mereka tidak tertarik untuk menjadi pengikut ustaz/pemuka agama yang radikal.

Meski demikian, pemahaman anti kekerasan dan Islam moderat (*wasathiyyah al-islâm*) ini perlu ditingkatkan dan diintensifkan, terutama untuk generasi milenial (*millennial generation*) yang sebagian “galau” dalam mencari identitas diri (Hamdi & dkk, 2021). Mereka harus diperkenalkan kembali dengan cara dakwah Rasulullah yang begitu lembut, sebagaimana Q.S. Ali Imrân/3: 159.

Selain dari pemahaman anti-kekerasan yang disampaikan melalui wahyu, ruang digital pun perlu diselamatkan dari agitasi ideologi anti kekerasan dan keterbukaan (Nurdin, 2018). Terdapat lima langkah yang harus diupayakan untuk menyebarkan islam moderat melalui ruang digital (Fairozi & A, 2020), di antaranya 1) sentralisasi media dakwah, artinya harus ada pengelola media yang mampu mengumpulkan ceramah-ceramah para dai moderat dalam akun tersebut; 2) responsif untuk menjadi *problem solving*, artinya para dai harus menyajikan materi dakwah yang menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang terjadi; 3) memberi penekanan pada isu penting; 4) *framing* dan *authoritative*, artinya para dai harus menunjukkan kredibilitasnya pada publik serta terus meningkatkan kemampuannya; dan 5) *digital friendly*, artinya adalah kecakapan atau penguasaan atas algoritma media digital.

3.2. Perbandingan Tingkat Pemahaman Mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap Konsep Moderasi Beragama

Berdasarkan hasil Uji Mann Whitney U diketahui nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,025 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kedua kelompok tersebut memang berbeda secara nyata atau signifikan. Artinya tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU terhadap konsep moderasi beragama, lebih tinggi daripada tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTKIN dengan selisih 3,69 poin. Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh (Anwar & Muhayati, 2021) yang menyatakan bahwa mahasiswa Perguruan Tinggi Umum (PTU) lebih rentan terhadap gerakan radikal dikarenakan cara pandang yang cenderung melihat masalah agama secara hitam putih.

Perbandingan tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama akan diuraikan sebagai berikut.

a. Komitmen Kebangsaan

Pada dimensi mengenai komitmen kebangsaan, dapat kita ketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam dimensi ini. Hal ini terlihat dari rata-rata yang diperoleh oleh mahasiswa PAI di PTU sebesar 74% sudah memiliki komitmen kebangsaan dan rata-rata yang didapat oleh mahasiswa PTKIN pada dimensi ini yaitu sebesar 73%. Perbedaan pemahaman antara mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terlihat pada beberapa indikator yang rentan. Untuk pemahaman mahasiswa PAI di PTU, kerentanan tersebut terlihat dari item ketiga (A3) tentang “Memilih Calon Kepala Daerah yang Baik/Jujur walau Berbeda Agama”. Pada item ini, hampir 50% responden memilih tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa empati mahasiswa PAI di PTU terhadap agama yang berbeda masih rendah, dan memerlukan bimbingan. Kerentanan tersebut juga terjadi pada mahasiswa PAI di PTKIN, yang mana hampir 60% mahasiswa PAI di PTKIN memiliki empati yang rendah terhadap pemeluk beda agama. Padahal, di negara Indonesia, tidak ada ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi pemimpin di Indonesia adalah beragama Islam. Tidak ada satupun UUD dan pasal yang disana berisi “larangan bagi seorang non muslim untuk menjadi pemimpin di Indonesia”. Pada pembukaan UUD 1945 hanya menjelaskan bahwa di negara Indonesia terdapat berbagai macam suku, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain (Qoniah & Zafi, 2020).

Kerentanan lain yang juga harus menjadi sorotan adalah komitmen kebangsaan mahasiswa PAI di PTKIN mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hampir 60% responden menyatakan bahwa Indonesia akan sejahtera jika mengadopsi system khilafah dalam pemerintahannya. Sedangkan pemahaman mahasiswa PAI di PTU hanya 40% yang setuju terhadap hal tersebut. Kerentanan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga di 18 kota/kabupaten di Indonesia, yang menyatakan bahwa pilihan jihad dan khilafah paling banyak diminati oleh generasi milenial (Hasan & dkk, 2018).

b. Toleransi

Berkenaan dengan pemahaman mengenai toleransi, 76% mahasiswa PAI di PTU sudah memiliki pemahaman yang cukup baik, sedangkan mahasiswa PAI di PTKIN hanya 72% yang memiliki pemahaman terhadap toleransi. Mahasiswa PAI di PTU cenderung sudah memiliki toleransi terhadap islam yang berbeda mazhab, sementara untuk toleransi pada agama yang berbeda, ada dua item yang memiliki kerentanan, yaitu toleransi dalam mengizinkan penganut agama lain memperingati hari raya keagamaannya di lingkungan sekitar, dan berusaha menciptakan suasana tenang saat ada perayaan hari besar agama lain di lingkungan sekitar, dimana sebesar 50% responden enggan mengizinkan dan menciptakan suasa tenang saat ada perayaan hari besar agama lain di lingkungannya.

Sementara itu, untuk mahasiswa PAI di PTKIN, ada 4 item yang sangat rentan, yakni 2 item berkaitan dengan toleransi kepada mazhab Islam yang berbeda, dimana lebih dari 80% enggan menikah dengan yang berbeda mazhab, serta 60% responden menganggap bahwa yang berbeda mazhab dengannya dianggap bukan islam. Padahal, toleransi tidak hanya dibutuhkan antar agama, tetapi juga antar golongan keislaman yang berbeda mazhab. Sikap toleransi tidak berarti membenarkan pandangan atau aliran yang dibiarkan tersebut, akan tetapi mengakui kebebasan serta hak asasi penganutnya (Bakry, 2014, hal. 175). Sedangkan 2 item lagi mengenai toleransi pada agama yang berbeda, dimana hampir 80% responden tidak mengizinkan penganut agama lain memperingati hari raya keagamaannya di lingkungan sekitar, dan hampir 70% nya enggan menciptakan suasana tenang saat ada perayaan har besar agama lain di lingkungannya.

Perbedaan pemahaman mengenai toleransi antara mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN ini sejalan dengan hasil survey PPIM UIN Jakarta pada tahun 2021 tentang Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi, yang menyebutkan bahwa mahasiswa dari Perguruan Tinggi Kedinasan memiliki toleransi yang lebih tinggi, disusul oleh Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, dan terakhir yaitu Perguruan Tinggi Agama.

c. Anti-Kekerasan

Sementara itu, untuk dimensi ketiga, yakni mengenai anti-kekerasan, baik mahasiswa PAI di PTU maupun di PTKIN sudah memiliki pemahaman anti-kekerasan yang cukup baik atau moderat. Bahkan dari hasil temuan menunjukkan bahwa hampir seluruh responden atau sekitar 98% mahasiswa PAI di PTU sudah menunjukkan sikap anti terhadap segala jenis kekerasan, dan 86% mahasiswa PAI di PTKIN pun memiliki pemahaman yang sama, apalagi mengenai kekerasan atas nama agama. Hanya saja, dari hasil penelitian ditemukan bahwa lebih dari 50% mahasiswa PAI di PTKIN mendukung organisasi yang suka merusak rumah ibadah agama lain. Padahal negara sudah menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya (Fidiyani, 2016, hal. 501). Rumah ibadah merupakan salah satu esensi dari ajaran setiap agama (Nugroho, 2020, hal. 1). Dalam mewujudkan pengabdian kepada Tuhan, masing-masing agama mempunyai tatacara atau ritual, juga tempat yang berbeda. Karena itu, intervensi negara terhadap pendirian rumah ibadah seperti peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pendirian rumah ibadah No.01/ber/Mdn/Mag/1969 dan No 8 dan 9 tahun 2006 sangat diperlukan karena begitu banyak persoalan yang mengakibatkan perselisihan agama yang disebabkan pendirian rumah ibadah di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama, sama-sama berada pada kategori sedang, namun ditemukan adanya perbedaan rata-rata yang cukup signifikan antara tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama berdasarkan data pertama, tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU sebesar 66,25% berada pada kategori sedang, sedangkan sisanya yakni sebesar 33,75% berada pada kategori tinggi. Dengan rincian 74% mahasiswa sudah menunjukkan komitmen kebangsaan, 76% mahasiswa sudah menunjukkan sikap toleransi, dan hampir seluruh mahasiswa PAI di PTU atau sebesar 98% telah menunjukkan sikap anti-kekerasan. Dengan demikian, tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU terhadap konsep moderasi beragama berada pada kategori sedang. Kedua, tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTKIN sebesar 77,5% berada pada kategori sedang, 21,25% berada pada kategori tinggi, dan sisanya berada kategori rendah. Dengan rincian 73% mahasiswa PAI di PTKIN sudah menunjukkan komitmen kebangsaan, 72% mahasiswa sudah menunjukkan sikap toleransi, dan 86% telah menunjukkan sikap anti terhadap kekerasan. Dan ketiga, dari hasil uji mann whitney U dengan menggunakan IBM statistics 22 diperoleh hasil asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,025. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang cukup signifikan antara tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama.

REFERENSI

- Ali, & Asrori. (2014). *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amar, A. (2018, Oktober). Nilai Wasathiyah-Toleran Dalam Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan. *CENDEKIA*, 10, 196-212.
- Anwar, R. N., & Muhayati, S. (2021). Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. *Al Tadzkiyyah*, 12. doi:10.24042/atjpi.v12i1.7717
- Anwar, S. (2016). Tolerance Education Through Islamic Religious Education in Indonesia. *1st UPI International Conference Sociology Education (UPI ICSE 2015)*, (hal. 438-442). Bandung. doi:10.2991/icse-15.2016.95
- Anwar, S. (2018). Internalization of Tolerance Values by Empowering the Environment as Learning Resource through Islamic Religious Education in Higher Education. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (hal. 1-8). Bandung: IOP Publishing. doi:10.1088/175-1315/145/1/012119
- Bakar, A. (2015, Juli-Desember). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. *TOLERANSI : Media Komunikasi Ummat Beragama*, 7, 1-9. doi:10.24014/trs.v7i2.1426
- Bakry, M. (2014). Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih. *Al-Ulum*, 14, 171-188.
- Dianita, G., & dkk. (2018). Implementasi Pendidikan Toleransi di Sekolah: Sebuah Kearifan Lokal di Sekolah Nahdlatul Ulama. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 5, 162-173. doi:10.17509/t.v5i2.16752
- Fairozi, A., & A, S. A. (2020). Digitalisasi Dakwah; Upaya Meningkatkan Daya Saing Islam Ramah di Era Pandemi. *Jurnal Bimas Islam*, 13, 308-318. doi:10.37302/jbi.v13i2.265
- Fidiyani, R. (2016). Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*, (hal. 501-510).
- Fuad, A. J. (2020). Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti*, 31, 153-164. doi:10.33367/tribakti.v31i1.991
- Hamdi, S., & dkk. (2021). Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi. *Intizar*, 27, 1-15. doi:10.19109/intizar.v27i1.8191
- Hanafi, Y., & dkk. (2022). Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa.

- Hasan, N., & dkk. (2018). *Literatur Keislaman Generasi Milenial*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Jentoro, & dkk. (2020). Peran Guru PAI Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Wasathiyah Siswa. *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, 3, 46-56. doi:10.31539/joeai.v3i1.1288
- Kusuma, B. W. (2020). Integrasi Nilai-nilai Islam Wasathiyah dan Kearifan Lokal dalam Dakwah Transformatif Pondok Pesantren Sabilul Hidaayah. *Tesis*, 1-210. Diambil kembali dari etheses.uin-malang.ac.oid/id/eprint/23582
- Malik, A. (2020). Membumikan Ideologi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membangkitkan Nasional. *Jurnal EduTech*, 6, 101-108.
- Masduqi, I. (2013). Deredikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-17. doi:10.14421
- Mubakkirah, F. (2018, Desember). Moderasi Islam: Dari Konsep Menuju Identitas. *Bilancia; Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*. doi:10.24239/blc.v12i2.369
- Munir, M. B., & Herianto. (2020). Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Serta Korelasinya Terhadap Pengaruh Kesehatan Mental, Keaktifan Berorganisasi dan Prestasi Akademik. *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*. 3, hal. 137-148. Pascasarjana IAIN Kediri.
- Nor S, J. (2020). Pemikiran Tasawuf Said Aqil Siroj. Dari Narasi Sufistik ke Komitmen Kebangsaan. *Tafaqquh*, 20-36. doi:10.52431/tafaqquh.v8i1.236
- Nugraha, M. (2018). *SNA Diyakini Jadi Pion Radikalisme di Kampus UPI, Pembina UKDM Ungkapkan Hal Ini*. Tribun Jabar.
- Nugroho. (2020, Desember). Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, 4, 1-17. doi:10.19109/jsa.v4i2.7341
- Nurdin, N. (2018). Nationality Insight, State Commitment and Nationalism in the View of Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, MA. *Jurnal Bimas Islam*, ii, 105-125.
- Paralihan, H. (2019). Hubungan antara Islam dan Demokrasi. *Aqlania : Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 63-83. doi:10.32678/aqlania.v10i01.2109
- Qoniah, S., & Zafi, A. A. (2020). Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih dan Hukum Tata Negara. *Al Imarah*, 5, 147-166.
- Saputra, R. E. (2018). *Api Dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z*. Banten: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, & Harahap, E. K. (2021). Pembangunan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19: Meneguhkan Komitmen Kebangsaan dan Mewujudkan Perdamaian. *Jurnal Literasiologi*, 6, 95-100. doi:10.47783/literasiologi.v6i1.246
- Sutrisno, E. (2019). Actualization of Religion Moderation in Educations Institution. *Jurnal Bimas Islam*, 12, 324-344.
- Suwarni, F. V., & Atasoge, A. D. (2021, Agustus-Desember). Komitmen Kebangsaan Mahasiswa STP Reinha Melalui Ritual Keagamaan dalam Spirit AYD 2017. *JURNAL REINHA*, 12, 22-28.